

**UPAYA INGO (*INTERNATIONAL NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION*) DALAM
AKTIFITAS *PEACEBUILDING* DI SIPRUS TAHUN 2008-2014**

Oleh Muhamad Zikron¹

1101120687

(zikopetrovic@rocketmail.com)

Pembimbing : Drs. Muhammad Saeri, M.hum

Abstracks

This reserach will discusse about effort of Non-Government Organization PeacePlayer International in Cyprus, 2008-2014 .Cyprus until now still hit by conflict and secession. Conflict in the Republic of Cyprus is from 13 new amendments proposed by the President of the Republic of Cyprus. This amendment was rejected by the representative of the President of the Republic of Cyprus as it is considered detrimental to the ethnic Turkish and manufacture without involving the vice president. Conflicts two leaders then have an impact on society and the parliament of the Republic of Cyprus. violence in almost every city in the Republic of Cyprus, the presence of organizations that represent each ethnic Greek and Turkish involvement and further aggravate the security situation in Cyprus, so in 1983 the ethnic Turkish declare independence. This independence is not recognized by the international community. This research use the perspective of pularalism with two-track diplomacy theory supported by the concept of peacebuilding and international organization. In the case of Cyprus non-government ornagization PeacePlayer International act as third party actor bridging dialoge between communities at the grassroots level. This NGO is only in charge of post-conflict situations and assisting intergovernmental agreement.

Keyword: Peacebuilding, Greek Cypriot, Turkish Cypriot, Peaceplayer International

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran di lapangan dari NGO *Peaceplayer Internationals* dalam aktifitas peacebuilding di Negara Siprus yang pada kenyataannya hingga sekarang masih terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah selatan di ditempati oleh etnis Yunani Siprus sedangkan di Utara oleh etnis Turki Siprus. Sebelumnya Siprus pernah dipengaruhi oleh orang-orang yang bersal dari Yunani yang datang sebagai pedagang dan imigran pada abad ke-13 SM.² Namun setelah dikuasai oleh kekaisaran Turki Usmani pada tahun 1571 terjadi eksodus besar-besaran dari orang-orang Turki ke Siprus dan semenjak itu etnis yang dominan di wilayah Siprus didominasi oleh orang-orang Yunani dan Turki. Pada masa kekuasaan kekaisaran Usmani hampir dipastikan tidak ada diskrimansi antara etnis mayoritas dengan minoritas. Hubungan antara masyarakat disana berjalan damai dan toleran. Pemerintah Usmaniu menduduki Siprus hingga tahun 1876.³

Siprus kemudian menjadi daerah koloni Inggris, setelah pemerintahan Usmani mengadakan perjanjian dengan pihak Inggris untuk melindungi wilayah Inggris dari serangan Rusia. Keinginan masyarakat etnis Yunani yang cenderung agar Siprus bergabung dengan Yunani dikenal dengan istilah enosis. Situasi semakin sulit dikendalikan ketika Gerge Grivas mendirikan kelompok bersenjata *Ethniki Organosis Kipriakou Agonos* (EOKA) atau dikenal dengan Organisasi Nasional Pejuang Siprus. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan agar Siprus bergabung dengan Yunani. Organisasi ini menggunakan

sarana kekerasan seperti sabotase, pengeboman, dan penembakan yang ditujukan kepada otoritas Inggris Raya dan juga masyarakat Siprus Turki. Sementara etnis Turki mendirikan kelompok yang dipimpin oleh Fazil Kucuk menuntut agar Siprus disatukan dengan Turki atau diadakan pemisahan wilayah atau dikenal dengan istilah *taksim*.⁴

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, pihak Inggris mengadakan pertemuan di Zurich yang juga dihadiri oleh Yunani dan Turki pada tahun 1959 dan dilanjutkan di London pada tahun 1960.⁵ Pertemuan ini menghasilkan kemerdekaan kepada Republik Siprus dengan Inggris, Turki, dan Yunani sebagai negara penjamin. Uskup Makarios terpilih sebagai Presiden dan Fazil Kucuk sebagai wakil Presiden Republik Siprus. Namun, adanya protes dari pihak Siprus keturunan Yunani mengenai permasalahan peraturan pajak, penciptaan kota yang terpisah, dan pembagian parlemen yang tidak adil membuat terjadinya perselisihan, oleh karena itu presiden Makarios mengajukan 13 amandemen baru pada tahun 1963, untuk mengatasi perselisihan tersebut. Beberapa poin penting dari amandemen tersebut adalah penghapusan hak veto yang selama ini dimiliki oleh Presiden dan wakil Presiden, meninggalkan sistem tata kota yang diinginkan oleh etnis Siprus Turki, dan penerapan sistem presentase populasi dalam sistem birokrasi sipil menggantikan sistem birokrasi sebelumnya yang dianggap tidak proporsional, karena porsi etnis Turki dalam parlemen jauh lebih besar dari jumlah populasi mereka yang sebenarnya (saat itu populasi etnis Siprus Turki kurang dari 20 persen). Usulan ini langsung ditolak oleh komunitas Siprus dalam parlemen dan oleh wakil Presiden Siprus, Fazil Kucuk. Hingga

² Citra Halim, 2013. *Upaya PBB Dalam Proses Reunifikasi Siprus Selatan Dan Siprus Utara*. Journal Ilmu Hubungan Internasional. Journal Universitas Mulawarman. Vol. 1, No. 3.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

pada tahun 1983 etnis Turki mengumumkan kemerdekaannya secara sepihak dengan wilayah Utara sebagai daerah teritorialnya.⁶

Dengan terpisahnya wilayah Siprus menjadi dua bagian menjadikan frekuensi konflik terutama yang menjurus kearah kekerasan menjadi berkurang. Namun disisi lain, faktor lain yang sewaktu-waktu bisa mengakibatkan konflik kembali adalah permasalahan hak pemanfaatan sumber daya alam dimana Siprus utara secara *de jure* masih merupakan bagian wilayah dari Republik Siprus. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan permasalahan konflik etnis tersebut maka PBB dan beberapa NGO internasional yang bekerjasama dengan NGO lokal terus berupaya untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut.⁷

NGO khususnya sebagai fenomena baru dalam beberapa dekade terakhir telah menempati posisi yang cukup krusial dalam memainkan peran penting bagi aktifitas pemulihan pasca konflik di beberapa negara. Alasannya menurut Lederach adalah sebagai aktor yang menjembatani hubungan antara level sistem politik tertinggi, pemimpin komunitas dan masyarakat awam (*Grassroot*).⁸ Selanjutnya Miall menjelaskan bahwa NGO Internasional didalam aktifitas perdamaian umumnya fokus kepada pencegahan terjadinya konflik (kekerasan) dan melakukan transformasi.⁹ Menurut Lederach lagi bahwa kehadiran NGO begitu penting karena mereka mampu bekerja dengan berbagai program jangka panjang, bersinggungan langsung¹⁰ dalam upaya untuk mencari akar penyebab konflik, dan bekerja sama dengan aktor yang terlibat

konflik secara langsung. Kecendrungan yang terjadi belakangan ini adalah ketika sebuah Negara kurang mampu atau bahkan tidak mampu sama sekali memainkan perannya dalam aktifitas *peacebuilding* maka yang terjadi adalah dengan mendatangkan aktor non-negara atau timbul dari inisiatif salah satunya adalah NGO itu sendiri. NGO bisa berasal dari dalam Negara yang dilanda konflik maupun berasal dari Negara lain.

Saat ini di sana terdapat beberapa aktifitas *Bi-komunal* dari kalangan orang-orang yang terorganisir. Mereka umumnya bersifat independen yang terdiri dari perkumpulan organisasi-organisasi. Kegiatan mereka mencakup seperti lokakarya dalam penyelesaian konflik, perdebatan, dan kelompok penelitian dan perjalanan.¹¹ Satu hal yang perlu dicatat lagi adalah bahwa beberapa organisasi yang bermunculan di Siprus bukanlah ditujukan untuk berafiliasi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik melainkan sebagai wadah bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam upaya rekonsiliasi di Siprus. Kebanyakan dari mereka juga bersifat terbuka dengan menyuarakan ide-ide, keinginan, opini yang objektif tentang masa kini dan masa depan Siprus tanpa takut di intimidasi oleh pihak manapun.¹² Namun meskipun demikian di Siprus masih banyak kekuatan-kekuatan asing yang berpotensi untuk menghambat proses perdamaian di Siprus seperti adanya campur tangan militer Yunani, Turki dan Inggris. Mereka dinilai sebagai salah satu penghambat proses perdamaian di sana.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Lederach, Dalam Hugh Miall, *Conflict Transformation: A Multi-dimensional Task*, tersedia di <http://www.berghof-handbook.net>

⁹ *Ibid*, Hugh Miall, hal 12

¹⁰ *Ibid*, Hugh Miall, hal 14

¹¹ Turgut Durduran dan George Stergiou Kaloudis, *CYPRUS: THE UNRESOLVED CONFLICT*, 1996, hal. 77

dalam <http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/dergi/kalou4.htm>

¹² *Ibid*, 77

Saat ini beragam sekali aktifitas organisasi ataupun NGO yang berada disana baik yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar Siprus. Hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Siprus yang pada waktu itu masih dibawah kekuasaan kolonial Inggris Raya dimana hanya memperbolehkan beberapa NGO yang berfokus pada masalah amal dan olahraga.¹³ Disamping itu corak organisasi perlawanan juga muncul pada masa kolonial Inggris dikalangan pemuda-pemuda Siprus sebagai bentuk perlawanan terhadap Inggris.¹⁴ Setelah masa kebebasan Siprus berhasil menghadirkan bagi tumbuh berkembangnya beberapa kegiatan LSM atau NGO yang lebih independen.

Two Track-Diplomacy Theory

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini dan menganalisa peran dari NGO *Peace Player International*, penulis menggunakan teori two track-diplomacy karena dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Istilah track two-diplomacy diciptakan pada awal 1980-an, tetapi pada praktiknya telah ada sejak tahun 1960-an, ketika Jhon Burton dan rekan-rekannya mulai melakukan sejenis kegiatan "*controlled communication workshop*". Kemudian model praktik seperti itu dalam pemecahan permasalahan terutama dalam resolusi konflik dikembangkan oleh Kelman (1972), Fisher (1972), Doob (1970), dan Azar (1983).¹⁵

Kemudian istilah tersebut mulai dipopulerkan oleh Joseph V. Montville pada tahun 1981. Ia mendefinisikan *track-two*

Diplomacy sebagai interaksi informal atau tidak resmi antara anggota kelompok yang bermusuhan atau Negara dengan tujuan untuk mengembangkan strategi, mempengaruhi opini publik, dan mengatur sumber daya manusia dan material dalam cara yang mungkin bisa membantu menyelesaikan konflik antar aktor .¹⁶ Meskipun Joseph V Montville memberikan kontribusi yang signifikan untuk bidang resolusi konflik internasional ketika ia menciptakan istilah "*track-two diplomacy*" pada tahun 1980, inovasi konseptualnya bukan tanpa preseden. Seperti yang telah dijelaskan diatas, beberapa kemiripan praktik dan istilah penamaan yang hampir sama dengan "*track-two Diplomacy*" bisa kita lihat dari beberapa sarjanawan yang mengembangkan model-model dalam pengembangan penyelesaian konflik. Diantaranya adalah istilah "diplomasi warga" yang dikembangkan oleh burton dan dukes pada tahun 1990-an, "diplomasi publik" oleh Hansen pada 1989, "diplomasi tidak resmi" diperkenalkan oleh Breman dan Jhonson pada 1977, mediasi non-resmi oleh Currie pada 1986 dan "pemecahan permasalahan analitis" oleh Azar dan Burton tahun 1972.¹⁷ Namun bagaimanapun istilah yang dikembangkan oleh Montville tersebut telah populer dan mewakili semua model-model yang telah dipraktikan oleh beberapa sarjanawan diatas.

Dalm praktiknya, "*track-two diplomacy*" merupakan salah satu upaya dari aktor non-pemerintah (*Unnofficial actor*) untuk membentuk saluran tidak resmi dan komunikasi dengan tujuan menghubungkan antara pihak yang bertikai . Berbeda dengan jalur diplomasi resmi (*track-one diplomacy*) yang biasanya diparktikan oleh aktor resmi seperti Negara atau individu sebagai perwkilan Negara, *track-two diplomacy*

¹³ Linda Fortstorm, *Op,Cit.* hal 11

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Nathan C. funk. 2000. *Theory And Parctice of Track-Two Diplomacy: Impact And Dynamic Of The Research For Common Ground In The Middle East Initiative.* American University Library, Wasingthon D.C. hal 21

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hal 32

dilakukan oleh aktor yang tidak terikat oleh negara.

Para sarjanawan yang mendukung *track-two diplomacy* dalam masalah penyelesaian konflik berargumen bahwa interaksi tidak resmi memberikan kebebasan yang lebih besar dibandingkan dengan interaksi resmi (inter-pemerintah) dalam hal berdialog dengan masyarakat yang berkonflik. Namun tujuan utama adalah sebagai langkah awal untuk membantu pemerintah menuju negosiasi resmi selanjutnya, seperti contoh untuk melegalisasi sebuah perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh antar aktor negara atau pemerintah. Pada jalur ini, (*track-two diplomacy*) hanyalah sebagai usaha untuk mencari kesepakatan damai ditingkat akar rumput sehingga membantu masyarakat untuk mempererat hubungan antar kelompok serta mencegah terjadinya konflik¹⁸, terutama yang menjurus ke dimensi kekerasan. Dalam teori *track-two diplomacy* ini mencoba untuk mengupayakan dialog antar kelompok yang bertikai dan memfasilitasi mereka dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk pemulihan hubungan dalam masyarakat, aktor di jalur ini juga berkonsentrasi pada bagaimana mengubah persepsi dan pendapat masyarakat sehingga menjadi masukan untuk aktor pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Track-two diplomacy memiliki dua proposisi yang menarik. Bunyi proposisi tersebut adalah : 1) Perjanjian resmi diperlukan, tetapi tidak cukup untuk perdamaian antar komunal, 2) dukungan komunal diperlukan, tetapi tidak cukup untuk upaya perdamaian yang efektif yang dilakukan oleh para pejabat¹⁹. Jadi masing-masing dari kedua model diplomasi diatas

saling melengkapi, diplomasi satu arah (diplomasi resmi) membawa elemen-elemen yang ada didalam masyarakat untuk mempromosikan perdamaian dan mengurangi konflik.²⁰

Dalam praktek *track-two diplomacy* menyediakan ruang untuk eksplorasi ide baru, untuk membangun hubungan, dan untuk memikirkan cara-cara dimana unsur-unsur masyarakat lebih aktif terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan konflik antar komunal. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa konflik aktual dan potensial dapat diselesaikan atau berkurang dengan menarik kemampuan manusia untuk merespon niat baik kelompok lain.

Peacebuilding

Dalam menganalisa tulisan ini, penulis juga menggunakan konsep *peacebuilding* untuk menghubungkan antara teori dan contoh kasus yang terjadi di Siprus. *Peacebuilding* merupakan konsep yang pertama kali dipopulerkan oleh PBB hingga sekarang berbagai definisi muncul mengenai konsep ini namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Berikut dijelaskan secara singkat mengenai konsep *peacebuilding*.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh mantan sekretaris jenderal PBB yakni Boutros Boutros Ghali. Pada tahun 1992 dalam laporannya yang bertajuk “*An Agenda For Peace*” memperkenalkan konsep *peacebuilding* kepada PBB sebagai “tindakan untuk mengidentifikasi dan struktur pendukung yang akan memperkuat perdamaian dan mencegah konflik terjadi lagi”.²¹ Selama bertahun-tahun berbagai upaya telah dilakukan untuk menguraikan definisi ini. Menurut laporan dari Brahimi

¹⁸ Marlene Jhonson. Video, <https://www.sophia.org/tutorials/multi-track-diplomacy--4> [diakses pada 10 Januari 2015]

¹⁹ Nathan C. Funk. Op Cit, hal 46

²⁰ Marlene Jhonson. Op. Cit.

²¹ <http://www.unpb.org/application-guidelines/what-is-peacebuilding/> [diakses 20 mei 2015]

dari tahun 2000 mendefinisikan *peacebuilding* sebagai “kegiatan yang dilakukan yang jauh dari konflik (setelah konflik) untuk memasang kembali dasar-dasar perdamaian dan menyediakan alat-alat untuk membangun yayasan-yayasan dengan tujuan untuk menghindari perang terjadi lagi”²²

Sedangkan pada tahun 2007, sekretaris jendral komite kebijakan PBB mendefinisikan *peacebuilding* sebagai berbagai langkah yang ditargetkan untuk mengurangi resiko konflik menjadi semakin memburuk dengan memperkuat kapasitas nasional disemua tingkat untuk manajemen konflik, dan meletakkan dasar bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Strategi perdamaian harus koheren dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari Negara yang bersangkutan, berdasarkan kepemilikan nasional untuk mencapai tujuan diatas.²³ Dalam kerangka umum ini, program dari *peacebuilding* adalah strategis, diprioritaskan dengan membahas akar dari penyebab konflik dan konsekuensi dari konflik. Program-program ini membangun kepercayaan dalam perjanjian perdamaian dan proses transisi, dan memberikan kontribusi untuk memulihkan kontrak sosial antara Negara dan masyarakat, termasuk melalui pembangunan lembaga dan pelayanan dan memperkuat hubungan intra-komunal.

Selain konsep *peacebuilding* yang sering kita dengar dalam permasalahan resolusi konflik, ada dua konsep mengenai perdamaian yang lain yang dikenal dengan *peacemaking* dan *peacekeeping*. Ketiga konsep tersebut sangatlah berbeda dalam penerapannya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Johan Galtung yang membuat tipologi tripatif mengenai perbedaan konsep tersebut.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Peacemaking misalnya, adalah aktifitas perdamaian yang cenderung berfokus pada proses kegiatan negosiasi anatar pengambil keputusan diarahkan dalam penyelesaian resmi atau resolusi konflik tertentu. Sedangkan *peacekeeping* adalah melibatkan intervensi dari pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak di Negara atau daerah yang sedang berada dalam keadaan transisi, yaitu dari kelompok yang bertikai dan mencoba berdamai atau didamaikan.²⁴

Konflik Siprus Pasca Merdeka

Menurut aturan konstitusi 1960 disebutkan bahwa Siprus merupakan sebuah Negara republik yang independen tanpa pemisahan wilayah dan etnis antara Utara dengan Selatan dengan presiden dijabat oleh Uskup Makarios III (Siprus-Yunani) dan wakilnya oleh Dr. Fazil Kucuk (Siprus-Turki)²⁵. Otoritas eksekutif umum dipercayakan kepada dewan menteri dengan rasio tujuh orang dari etnis Siprus-Yunani dan tiga orang dari etnis Siprus-Turki. Dengan kata lain Siprus-Yunani mewakili 78% dari populasi, dan Siprus-Turki 18%, sisanya 4% untuk etnis Armenia, Maronit dan Latin.²⁶

Sementara itu aturan dalam konstitusi juga menyebutkan bahwa badan yang bertugas untuk mengontrol masalah pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan untuk masing masing wilayah komunal (utara-selatan) dipisah dan masing-masing memiliki wewenang tersendiri. Badan ini disebut dengan Siprus *Chamber Comunal*

²⁴ I.Gawerc, Michelle. 2006. *Peace-Building: Theoretical And Concrete Perspectives*. Journal Of Peace History Society and Peace and Justice Studies Association. Washigton D.C, USA. Vol. 31, No. 4, hal 439

²⁵ Mallinson, William. -. *Cyprus: A Historical Overview*. __., hal 26

²⁶ *Ibid*

atau lebih mirip dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Hanya dalam beberapa bulan terjadi protes mengenai aturan konstitusi oleh etnis Siprus-Yunani. Protes tersebut ditujukan kepada pemerintah Republik Siprus mengenai ketimpangan peraturan tentang perpajakan, penciptaan kota yang terpisah, dan pembagian parlemen yang tidak adli. Oleh karena itu presiden Makarios mengajukan 13 amandemen baru pada tahun 1963²⁷ untuk mengatasi perselisihan tersebut.²⁸ Beberapa poin penting dalam amandemen tersebut adalah penghapusan hak veto yang selama ini dimiliki oleh presiden dan wakil presiden, meninggalkan sistem tata kota yang diinginkan oleh etnis Siprus-Turki, dan menerapkan sistem presentase yang adil yang sebelumnya dianggap kurang efektif²⁹ karena porsi dari wakil Siprus-Turki terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah populasi mereka di Republik Siprus, dan usulan ini ditolak langsung oleh Dr. Fazil Kucuk selaku wakil presiden Republik Siprus pada masa itu. Hal inilah dikemudian hari berdampak pada perpecahan kelompok etnis dan menyebabkan pemisahan (partisi) dari wilayah Utara dan selatan.

Konflik ini tidak hanya melibatkan masing-masing etnis tapi juga Turki dan Yunani. Keterlibatan Turki bisa dilihat dengan reaksi militer mereka dengan menginvasi wilayah Siprus bagian utara pada tahun 1975 dan berhasil menguasai 38% wilayah tersebut. Dalam peristiwa ini sebanyak 600 orang tewas dan juga mengakibatkan terjadinya eksodus warga Siprus-Yunani dari wilayah utara ke selatan begitu juga sebaliknya etnis Siprus-Turki dipaksa oleh masyarakat Siprus-Yunani

untuk meninggalkan wilayah selatan menuju wilayah utara. Hingga pada akhirnya etnis Siprus-Turki pada tahun 1983 mengumumkan kemerdekaan secara sepihak dengan wilayah utara sebagai teritorialnya.

Peran *PeacePlayer International*

Kontribusi dari NGO dalam upaya peacebuilding secara umum telah dipertimbangkan pada tingkat akar rumput dan tingkat Negara-bangsa. Dalam hal ini yakni peran NGO *Peaceplayer International* dengan menggunakan olahraga basket bisa dilihat dengan bagaimana cara mereka menciptakan suatu lingkungan dimana orang dapat dating bersama-sama untuk bekerja menuju tujuan yang sama, menghormati orang lain dan ruang untuk saling berbagi pengalaman. Semua aspek ini sangat penting untuk proses perdamaian dan dicontohkan oleh NGO ini.³⁰

Salah satu keberhasilan dari program yang dijalankan oleh *PeacePlayer International* adalah pernyataan dari mayoritas peserta yang menilai tentang kegiatan mereka dapat mengurangi stereotip negatif dalam memandang satu dengan yang lain dan mengurangi perlakuan rasial. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh peaceplayer nternational. Metode yang digunakan *Peaceplayer International*³¹ ini mendorong integrasi sosial diantara kelompok-kelompok etnis yang berbeda di Siprus.

Kecakapan hidup yang dipelajari melalui olahraga membantu memberdayakan individu dan meningkatkan kondisi psikososial peserta kearah yang lebih baik seperti peningkatan ketahanan, harga diri

²⁷ *Ibid* hal 30

²⁸ *Ibid*

²⁹ Dodd, Clement (2010). *The History and Politics of the Cyprus Conflict*. Palgrave Macmillans . hal 145

³⁰ http://www.sportanddev.org/en/learnmore/sport_and_peace_building/the_role_of_sport_in_peace_building/ [diakses pada 19 Juni 2015]

³¹ *Ibid*

dan koneksi dengan orang lain. Penggunaan kegiatan olahraga yang coba dikembangkan oleh NGO ini berhasil menjadi alat rehabilitasi trauma di zona pasca konflik dengan menggunakan metode yang lebih terstruktur untuk dampak jangka panjang maupun jangka pendek.³² Pembentukan kegiatan olahraga dapat membantu korban sosial dan psikologis untuk kembali normal, memberikan rasa aman dan stabilitas, dan membangun kembali jaringan sosial. Hal ini yang coba dilakukan oleh *PeacePlayer International* melalui program Klub Basket Kembar dan *Summer Camp*.

Kegiatan olahraga yang dilakukan oleh *PeacePlayer International* berhasil menciptakan ruang yang diperlukan melalui keyakinan dan kepercayaan untuk mendiskusikan berbagai masalah pasca konflik. Hal ini bisa kita ambil dari teori “*web making*” yang dikemukakan oleh Lederach, sebuah pendekatan untuk perdamaian. Dia mendorong intervensi yang secara eksplisit fokus pada jaringan strategis atau “*web-making*”. *Web Making* terutama relevan untuk NGO yang bekerja dibidang olahraga dan rekonsiliasi. Karena mereka merupakan *middlelevel actor* yang berperan dalam membawa orang bersama-sama untuk saling berdialog, bertukar ide dan membuat program-program perdamaian dan rekonsiliasi.³³

Kegiatan seperti Pengembangan ketrampilan dan kepemimpinan serta *summer Camp* adalah salah satu yang bisa menyatukan anak-anak dari kedua komunitas di Siprus. Dengan membawa

anak-anak dari kedua komunitas dalam satu tempat yang kemudian dibina dalam beberapa waktu. Hal ini kemudian menjadi tujuan utama mereka yakni sesuai dengan jargon mereka “*Children Who Play Together Can Learn to Live Together*”.

Secara umum intervensi melalui olahraga yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan berkontribusi terhadap pembangunan budaya harus memiliki karakteristik yang menyediakan peserta rasa aman, keadilan, kompetensi, otonomi, dan memungkinkan para peserta untuk bebas berkespresi mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Ketika orang-orang berinteraksi dan bermain dalam konteks seperti itu, olahraga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan, persahabatan, solidaritas dan berkontribusi terhadap pengembangan kepribadian.³⁴ Hal inilah yang coba dilakukan oleh NGO *PeacePlayer International* dalam membawa remaja dan anak-anak komunitas Siprus Yunani dan Turki dalam program pendidikan yang juga mengajarkan ketrampilan hidup. *PeacePlayer International Cyprus* walaupun saat ini secara empirik belum ditemukan dampak yang nyata dari program mereka, namun indikasi meningkatnya jumlah partisipan yang mengikuti setiap program yang diadakan menjadi bukti salah satu keberhasilan mereka. Keberhasilan tersebut bisa jadi dalam rentang waktu yang cukup lama (*long term impact*).

Simpulan

Konflik Siprus Utara dan Selatan adalah konflik yang dilatarbelakangi etnis, antara Siprus Yunani yang mayoritas menduduki Siprus Selatan dan Siprus Turki yang menduduki Siprus Utara. Konflik semakin pelik kedua tetangga Siprus, Yunani dan Turki saling merasa memiliki ikatan darah, invasi Turki pada 1964, banyak

³² Serena, B. 2009. *The Contribution of Sport Within The Process of Peace And Reconciliation*. Disertation . Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italia. Hal 29

³³ L, Alexis. 2007. *Characteristic and Psycho-Social Impacts of an Inter-Ethnic Educational Sport Initiative on Greek and Turkish Cypriot Youth*. Disertation. University of Connecticut, USA. Hal 62

³⁴ *Ibid*

menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Berbagai penyelesaian terutama yang dilakukan oleh PBB dengan aktifitas *peacekeeping* dan *peacemaking* seperti keterlibatan pasukan penjaga perdamaian UNFICYP, disusul oleh upaya mediasi oleh Kurt Waldheim dan Javier Perez de Cuellar. Demikian pula yang dilakukan oleh Koffi Annan dengan kegagalan referendum di Siprus.

Kegiatan *peacebuilding* yang merupakan level terakhir yang bisa dilakukan di Siprus mengingat kondisi disana bisa dikategorikan kedalam perdamaian negatif yakni ketiadaan perang. Dengan demikian keberadaan NGO tetap dibutuhkan dalam bentuk penguatan kapasitas masyarakat sipil dan kelmbagaan. Bila usaha pembangunan perdamaian sukses pada tingkat akar rumput, maka sewaktu-waktu sebuah referendum bisa diuji kembali, yang diharapkan penduduk kedua komunitas lebih dewasa dan menyambut positif usaha penyatuan.

Peace Player International, adalah salah satu organisasi yang turut serta dalam aktifitas-aktifitas *Peace Building* di Siprus yang berkonsentrasi dibidang pendidikan olahraga khususnya basket yang mengupayakan para anak-anak atau pemuda bermain dalam satu tim dan saling memahami, dengan demikian diharapkan tidak ada lagi stigma negatif anantara kedua komunitas tersebut. Mereka memiliki jargon, "*children who play together can learn to live together*". Program-program yang dilakukan oleh NGOs ini memungkinkan bagi generasi muda disana untuk memiliki life skill dan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam lingkungan yang multikultural.

Selain itu keberadaan NGO-NGO yang lain terutama yang berfokus terhadap promosi perdamaian/Promoting Peace juga memiliki peran dalam penguatan

masyarakat. Fokus mereka beragam dalam melakukan aktifitas *peacebuilding* mulai dari penelitian, pendidikan, teknologi, dialog dan olahraga kepemudaan. Upaya tersebut ditujukan untuk meyakinkan masyarakat Siprus akan pentingnya keberagaman dalam komunitas yang plural.

Daftar Pustaka

Jurnal

Citra Halim, 2013. *Upaya PBB Dalam Proses Reunifikasi Siprus Selatan Dan Siprus Utara*. Journal Ilmu Hubungan Internasional. Journal Universitas Mulawarman. Vol. 1, No. 3.

I.Gawerc, Michelle. 2006. *Peace-Building: Theoretical And Concrete Perspectives*. Journal Of Peace History Society and Peace and Justice Studies Association. Washigton D.C, USA. Vol. 31, No. 4, hal 439

Turgut Durduran dan George Stergiou Kaloudis, *CYPRUS: THE UNRESOLVED CONFLICT*, 1996, hal. 77 dalam <http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/dergi/kalou4.htm>

Buku

Dodd, Clement (2010). *The History and Politics of the Cyprus Conflict*. Palgrave Macmillans.

Lederach, Dalam Hugh Miall, *Conflict Transformation: A Multi-dimensional Task*, tersedia di <http://www.berghof-handbook.net>

Mallinson, William. *Cyprus: A Historical Overview*. __.

Nathan C. funk. 2000. *Theory And Parctice of Track-Two Diplomacy: Impact And Dynamic Of The Research For Common Ground In The Middle East Initiative*. American University Library, Wasingthon D.C.

Video

Marlene Jhonson. Video, <https://www.sophia.org/tutorials/multi-track-diplomacy--4> [diakses pada 10 Januari 2015]

Situs Internet

http://www.sportanddev.org/en/learnmore/sport_and_peace_building/the_role_of_sport_in_peace_building/ [diakses pada 19 Juni 2015]

<http://www.unpbf.org/application-guidelines/what-is-peacebuilding/> [diakses 20 mei 2015]

Disertasi

L, Alexis. 2007. *Characteristic and Psycho-Social Impacts of an Inter-Ethnic Educational Sport Initiative on Greek and Turkish Cypriot Youth*. Disertation. University of Connecticut, USA.

Serena, B. 2009. *The Contribution of Sport Within The Process of Peace And Reconciliation*. Disertation. Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italia.